Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Volume 4, No. 2, Juni 2026 – September 2026, pp. 3784-3793
E-ISSN: 2987-4475
https://pchukumsosial.org/index.php/pchs

Collaborative Governance dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Kampung Lawas Maspati Kota Surabaya

Henik Tristian[1*], Sulikah Asmorowati[2]
[1,2]Universitas Airlangga, Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.
henik.tristian@fisip.unair.ac.id

Abstract
The development of slum areas has become a concern from time to time by the Central Government to the regions, several programs and innovations both initiated by the government and the community can be a joint solution in solving existing problems. This research seeks to analyze how collaborative governance is in developing tourist destinations located in Kampung Lawas Maspati Surabaya City. The approach used comes from Donahue's theory in photographing the phenomenon of collaborative governance. Meanwhile, the research method approach used in this research is a qualitative descriptive type with data collection techniques using interviews and documentation studies, finally the validity of the existing data uses an interactive analysis model sourced from Miles, Huberman and Johny Saldana. The research results show that collaborative governance built by government, private and community actors was initially successful in creating the Kampung Pelangi tourist destination, but along the way the collaboration process was no longer running sustainably due to various technical factors.
Keywords: Collaborative Governance; Development; Tourist Destinations.

Abstrak
Pembangunan Kawasan kumuh menjadi perhatian dari periode waktu kewaktu oleh Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintahan Daerah, beberapa program dan inovasi baik yang dimulai dari pemerintah maupun masyarakat bisa menjadi solusi bersama dalam pemecahan permasalahan yang ada. Penelitian ini berusaha menganalisis bagaimana *collaborative governance* dalam pengembangan destinasi wisata yang terletak di Kampung Lawas Maspati Kota Surabaya. Pendekatan yang digunakan bersumber dari teori Donahue dalam memotret fenomena terkait dengan *collaborative governance*. Sementara itu pendekatan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumentasi, terkahir validitas data yang ada menggunakan model analisis interaktif yang bersumber dari Miles, Huberman dan Johny Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* yang dibangun oleh aktor pemerintah, swasta dan masyarakat awalnya sukses dibangun dalam menciptakan destinasi wisata kampung Lawas Maspati, namun dalam perjalanannya proses kolaborasi yang sudah tidak berjalan secara *sustainable* dikarenakan berbagai faktor teknis.
Kata Kunci: Tata Kelola Kolaboratif; Pembangunan; Destinasi Wisata.

Copyright (c) 2026 Henik Tristian, Sulikah Asmorowati

✉Corresponding author: Henik Tristian
Email Address: henik.tristian@fisip.unair.ac.id (Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia)
Received 11 September 2026, Accepted 17 September 2026, Published 23 September 2026

PENDAHULUAN

Pemukiman penduduk pada hari ini semakin sempit dan sulit diakses bagi masyarakat yang belum memiliki hunian tetap. Disamping itu, jumlah pemukiman yang ada semakin padat. Hal ini kita bisa lihat dalam Kampung Lawas Maspati yang terletak di Kota Surabaya. Di balik hiruk pikuk Surabaya sebagai kota metropolitan, terdapat sebuah desa yang relatif tersembunyi di ibu kota Jawa Timur. Namanya yaitu Kampung Lawas Maspati. Kelurahan ini memiliki deretan rumah tinggal yang terletak di Kawasan dataran rendah, bubutan, kota Surabaya. Kampung Lawas Maspati sukses menjadi pintu masuk kawasan wisata Surabaya Utara setelah diresmikan pada 24 Januari 2016. Kampung Lawas Maspati menjadi destinasi wisata yang ramah bagi wisatawan local maupun mancanegara. Sesampainya

di desa ini, wisatawan bisa mengagumi deretan rumah bercat cerah warna-warni yang tentunya menarik perhatian untuk melakukan dokumentasi atau swafoto pribadinya di media sosial (Sindonews, 2018). Seiring berjalannya waktu, eksotisme Kampung Lawas Maspati mulai memudar, sebagian besar mural dan cat rumah masih terlihat menarik, meskipun tentu tidak semuanya seterang Ketika baru dicat pada awal tahun peresmian (Detiknews, 2022).

Menurut Ansel dan Gash *Collaborative governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsesus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik. Alison Gash (2016) menjelaskan bahwa pendekatan collaborative governance telah mewakili bagi banyak pembuat kebijakan, manajer publik, dan anggota masyarakat sebagai pendekatan dalam pembuatan kebijakan yang mengutamakan hierarki dan ketertiban yang inklusi serta mengedepankan berbagai inovasi.

Collaborative governance adalah sebuah paradigma yang menggerakkan pemangku kepentingan atau aktor-aktor pemerintah atau yang disebut dengan NGO, pelaku bisnis, tokoh-tokoh masyarakat dan kelompok intelektual yang terlibat andil dalam memformulasikan suatu kebijakan-kebijakan yang disepakati secara bersama-sama (Noor, Suaedi & Mardiyanta, 2022). *Collaborative Governance* adalah sebuah metode perumusan kebijakan publik serta manajemen publik yang bernilai dan bermakna dalam prosesnya ada keterlibatan aktor yang bukan dari internal pemerintah seperti tokoh masyarakat, pelaku bisnis, intelektual kampus, NGO, serta lembaga-lembaga di luar pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan publik secara bersama-sama (Emerson & Nabatchi, 2015).

Dalam teori *collaborative governance* adanya tolak ukur kesuksesan dan kegagalannya. Hal ini sangat penting untuk dipahami dalam menilai dalam sebuah impelementasi dari *collaborative governance* itu sendiri. Dalam melakukan suatu kolaborasi tentunya ada beberapa faktor penghambat yang memengaruhi berjalannya proses kolaborasi tersebut. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam suatu kolaborasi menurut *Government of Canada* (2008) diantaranya:

Faktor Budaya

Ketergantungan pada suatu tradisi budaya dan tidak berani mengambil keputusan dapat menghambat kolaborasi dan tidak menimbulkan kemajuan dalam peningkatan kualitas kolaborasi itu sendiri. Suatu kolaborasi itu bisa dikatakan gagal apabila masih dipertahankannya konsep top-down oleh pihak pemerintah ketika menjalin kolaborasi dengan pihak lain, masih adanya dominasi dari pihak pemerintah dan tidak menjalankan kesepakatan berdasarkan mentalitas kerjasama dalam menjalankan sebuah kolaborasi.

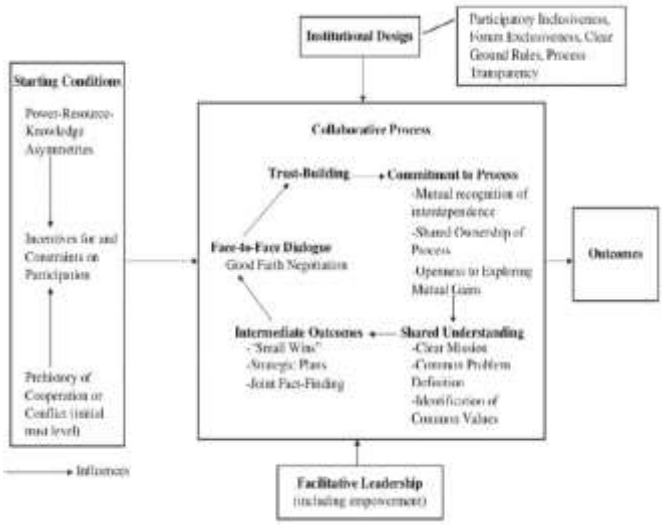
Faktor Institusi

Kolaborasi bisa dilakukan karena adanya kecenderungan institusi-institusi yang terlibat dalam Kerjasama atau kolaborasi (terutama dari pemerintah) cenderung menerapkan struktur hierarkis terhadap institusi-institusi lain yang ikut terlibat dalam kolaborasi tersebut.

Faktor Politik

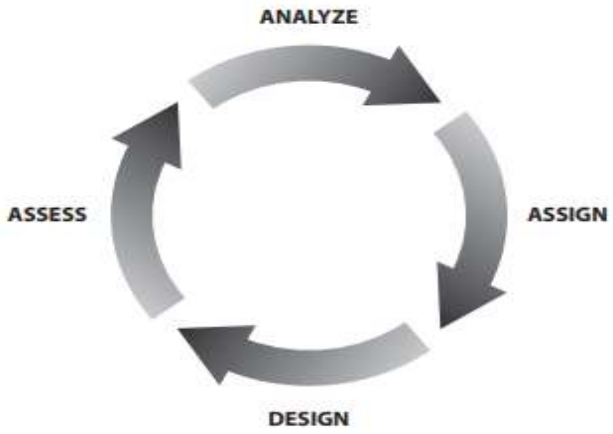
Suatu kolaborasi dapat menimbulkan kegagalan apabila kurangnya inovasi para pemimpin dalam mencapai tujuan-tujuan politik yang kompleks dan kontradiktif. Kepeminpinan yang inovatif adalah pemimpin yang bisa menjadikan sebagai inti pemerintahan yang kolaboratif dan memberikan inspirasi untuk pencapaian hasil-hasil yang positif.

Ansel dan Gash membangun enam kriteria penting untuk kolaborasi yaitu (1) forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga, (2) peserta dalam forum termasuk aktor nonstate, (3) peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan d,an bukan hanya ''dikonsultasikan' oleh agensi publik, (4) forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif, (5) forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus (bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik), dan (6) fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen (Ansell C & Gash A, 2007:544). Adapun model *collaborative governance* dari Ansel dan Gash dapat dilihat sebagai berikut (Gambar 1)



Gambar 1. Collaborative Governance Model Ansel & Gash
Sumber: Ansel & Gash (2007)

Sementara itu, Donahue & Zeckhauser menjelaskan beberapa dimensi penting dalam *collaborative governance* yang antara lain: (1) *Analyze*. Langkah pertama dalam proses ini adalah menganalisis situasi (Kirana & Artisa, 2020; Akbar, Supriyono & Domai, 2022). (2) *Assign*, Penugasan adalah hal penting untuk mendapatkan pemain yang tepat di posisi yang tepat. (Rianti, F., & Winarni, F, 2018). (3) *Design,* adalah peran pelengkap untuk menugaskan tanggung jawab. Tahapan ini memberi tahu apa yang boleh dan diharapkan dilakukan oleh setiap penerima tugas, bagaimana dia melakukannya akan dipantau dan diberi penghargaan, berapa lama dia akan mempertahankan responsnya, (Kurniawan, *et.al*, 2022; Bela, H, S., & Utama, A, S, 2022) (4) *Assess*. merupakan kesepakatan jangka panjang dan bukan hanya sekedar urusan satu kali saja. (Gurvantry, D., Febriansyah, A., & Tampubolon, J., 2022). Adapun Model proses kolaborasi yang ada dari Danohue & Zeckhauser dapat dilihat sebagai berikut (Gambar 2).



Gambar 2. *Collaborative Governance* Model Donahue & Zeckhauser
Sumber: Donahue & Zeckhauser (2011)

Pendekatan *collaborative governance* dalam sebuah pembangunan telah banyak dilakukan oleh berbagai aktor yang ada. Hal ini sebagaimana yang ada dalam penelitian yang dilakukan oleh Afriyanto, Wijayanti & Rahardian (2020) yang dalam penelitiannya menunjukan bagaimana keberhasilan Kota Surabaya dalam mengembangkan Destinasi Wisata Kampung Tua Maspati. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Subatin & Pramusinto (2019) yang dalam penelitiannya mencoba mengangkat isu *collaborative governance* dalam konservasi Anoa di Manado. Melengkapi penelitian yang ada tersebut, penelitian yang dilakukan oleh kami berupaya mencoba menganalisis bagaimana proses kolaborasi yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan pihak swasta dalam *collaborative governance* pada pengembangan destinasi wisata kampung Lawas Maspati yang terletak di Kota Surabaya yang masih belum terbangun secara *sustainable* yang dapat dilihat dari hilangnya estetika warna cat yang mulai memudar. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *"Bagaimana collaborative governance dalam pengembangan Kampung Lawas Maspati di Kota Surabaya?"*

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersumber dari Craswell (2021) yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha melihat fenomena-fenomena sosial dalam kehidupan sehari-hari. Lokasi penelitian terletak di kawasan Kampung Lawas Maspati, Kota Surabaya. Waktu penelitian dimulai dari Juni 2026. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Sementara itu, Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling*. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 3 (tiga) orang meliputi aktor pemerintah, swasta dan masyarakat. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif dari Miles, Huberman dan Jhony Saldana (2015) yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, kondensasi data, penarikan simpulan dan verivikasi. Terakhir, validitas data ini menggunakan trianggulasi sumber.

HASIL DAN DISKUSI

Analyze

Collaborative governance menjadi sebuah *tren* dalam suatu pemerintahan, dimana *collaborative governance* mampu menjadi sebuah soluasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam suatu pemerintahan maupun masyarakat. Kolaborasi sering dikatakan meliputi berbagai aspek pengambilan keputusan, implementasi hingga evaluasi. Berbeda dengan bentuk kolaborasi lainnya atau interaksi stakeholders bahwa organisasi lain dan individu berperan sebagai bagian strategi kebijakan, *collaborative governance* menekankan semua aspek yang memiliki kepentingan dalam kebijakan membuat persetujuan bersama dengan "berbagi kekuatan". (Taylo Brent and Rob C. de Loe, 2012). Dalam *tren* kolaboratif ini juga dilakukan di Kampung Lawas Maspati. Pada awal mula kondisi Kampung Lawas Maspati ini hanya kampung permukiman biasa yang berada di pusat kota Surabaya. Meskipun memiliki nilai Sejarah yang tinggi, potensi tersebut belum dimanfaatkan sebagai destinasi wisata. Perubahan dimulai Ketika warga mengikuti program Surabaya *Green and Clean*, kampung mulai dibersihkan dan ditata, disini Kerjasama dengan PT Pelindo III mulai berjalan. Rumah-rumah mulai di cat dan dihiasi mural, tanaman TOGA mulai dikembangkan, potensi Sejarah diinventariskan. Selain PT Pelindo III, Pemerintahan Kota Surabaya bersama dengan masyarakat dan pihak Swasta berkomitmen mengembangkan Kampung Lawas Maspati dengan maksud untuk meningkatkan *value* dan pemberdayaan masyarakat agar roda perekonomian tersebut berjalan. Penelitian yang dilakukan oleh Kirana & Artisa (2020) menunjukan bahwa dalam kondisi awal kolaborasi menjadi hal yang penting dalam membangun kolaborasi. Umumnya, kolaborasi terjadi karena adanya ketergantungan antara ketiga pihak tersebut, di mana mereka saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, terciptalah suatu hubungan saling menguntungkan (Rahmawati, Said & Sekarsari, 2024). Terakhir, dalam penataan atau revitalisasi suatu wilayah diperlukan mekanisme kolaborasi antar berbagai pihak, hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah Sulawesi dalam penataan Danau Tempe yang melibatkan lintas aktor yang bekerja secara partisipatif dan kolaboratif (Zamzani, Mujiburohman, Salim & Dewi, 2022).

Asign

Awal mula terjadinya kolaborasi PT Pelindo III dengan Kampung Lawas Maspati yaitu sebagai bagian dari program CSR *(Corporate Social Responsibility)* atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Kolaborasi antara PT Pelindo III dengan Kampung Lawas Maspati dengan tujuan untuk merevitalisasi Kampung Lawas Maspati menjadi kampung yang lebih berwarna dan estetik, PT Pelindo III menyediakan pendanaan dan pendampingan untuk penataan lingkungan kampung wisata. Kolaborasi yang dilakukan diharapkan dapat membuat kehidupan masyarakat terlihat lebih baik, dan menjadikan Masyarakat mandiri. Penelitian yang dilakukan oleh Rianti, F., & Winarni, F, (2018) menunjukan bahwa dalam berkolaborasi, aktor-aktor yang terlibat dalam proses kolaborasi membagi tugas sesuai dengan kesepakatan diawal. Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Maharami,

Kelana & Madya (2024) menjelaskan bahwa program perencanaan yang tidak didukung oleh pelaksana yang kompeten dan berintegritas tinggi akan sulit meraih keberhasilan.

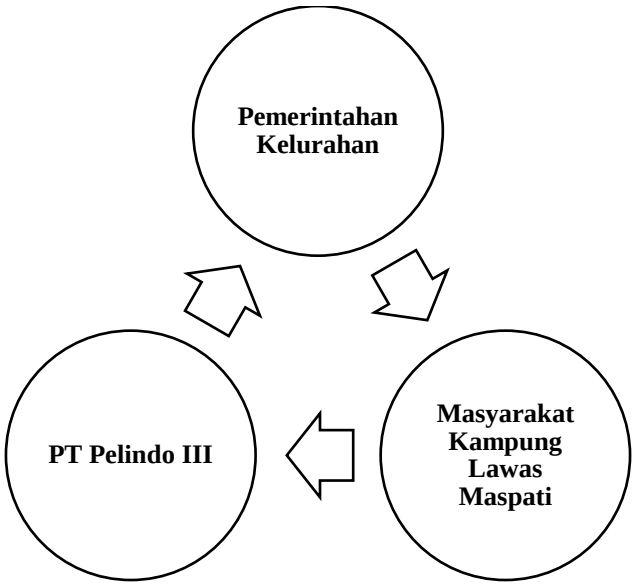
Design

Adapun dalam kolaborasi untuk menciptakan Kampung Lawas Maspati yang cerah, pendanaan yang diberikan oleh PT Pelindo III digunakan untuk membeli cat dari produsen cat komersial melalui proses pengadaan. Pengecetan itu dimulai dari tembok rumah hingga atap rumah yang akan menciptakan Kampung Lawas Maspati terlihat lebih cerah dan indah dari seluruh bagian bangunan. Dalam kolaborasi yang dilakukan, adapun aktor atau peran pemangku yang terlibat dalam kolaborasi tersebut yaitu Pemerintah Kota Surabaya, Ketua RT/RW, Masyarakat, tim CSR PT Pelindo III. Dalam proses pengecatan dilakukan oleh Masyarakat, RT/RW, tim CSR PT Pelindo III, dan Pemkot Surabaya. Dengan adanya kerjasama yang telah dilakukan pada tahun 2015 sampai 2019, mampu menciptakan suasana kehidupan baru yang lebih berwarna, dimana seluruh rumah warga Kampung Lawas Maspati saat itu terlihat lebih cerah seperti pelangi yang bersinar.

Setelah dilakukannya pengecetan rumah warga di Kampung Lawas Maspati ini diresmikan oleh Walikota Surabaya saat itu, yaitu Ibu Tri Rismaharini Bersama pihak PT Pelindo III pada tahun 2016. Sehingga dengan kondisi Kampung Lawas Maspati yang baru tersebut mampu menarik perhatian masyarakat lokal khususnya masyarakat Kota Surabaya yang tertarik untuk mengunjungi kampung tersebut dengan berbagai tujuan seperti melakukan swafoto maupun hanya kunjungan sebagai wisata. Dimana pada saat itu Kampung Lawas Maspati menjadikan bangunannya lebih estetik, suasana udara yang sejuk dan asri di tengah hiruk-pikuk kota metropolitan yang mayoritas udaranya mulai tercemar dan adanya tanaman TOGA membuat pengunjung merasa nyaman dengan suasana kampung yang masih asri. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ketua RW, Bapak Sabar Susanto mengatakan:

"Hasil kolaborasi Kampung Lawas Maspati dengan PT Pelindo III berjalan dengan baik, bisa merubah Kampung Lawas Maspati menjadi destinasi wisata, dan juga membantu meningkatkan kemampuan usaha msayarakat melalui pelatihan-pelatihan, supaya UMKM bisa berjalan dengan maksimal, dan Masyarakat bisa mandiri, tetapi Kerjasama itu hanya berjalan sampai tahun 2019" (wawancara, juni 2026).

PT Pelindo III juga memberikan pemberdayaan Masyarakat, karena yang menjadi focus utama bukan hanya Pembangunan fisik, tetapi membangun kapasitas warga melalui pembentukan kelompok sadar wisata, peningkatan gotong royong, dan pelatihan keterampilan *(life skill)*. Karena kerjasama antara PT Pelindo III dengan Kampung Lawas Maspati hanya sampai tahun 2019, sehingga mengakibatkan cat rumah yang awalnya warna warni mulai memudar. Tetapi dengan pembinaan yang sudah diberikan, warga Masyarakat melakukan pengecatan ulang secara berkala. Selain melakukan pengecatan ulang, kolaborasi yang dilakukan juga mencakup pembangunan fasilitas wisata, pelatihan UMKM, pelestarian rumah tua, pengembangan urban framing, dan promosi wisata



Gambar 3. *Collaborative Governance* Kampung Lawas Maspati
Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2026

Assess

Kolaborasi yang dilakukan dengan Pemerintah dan PT Pelindo III membuahkan hasil yang sangat baik. Dengan kolaborasi tersebut, Kampung Lawas Maspati berkembang menjadi destinasi wisata Sejarah. Lingungan disana menjadi lebih bersih, asri, dan tertata. Bangunan tua semakin mempesona, memperlihatkan unsur sejarahnya. Lingkungan semakin hijau, karena banyak tumbuh tanaman TOGA, menjadikan Kampung Lawas Maspati semakin sejuk dan asri. UMKM Masyarakat semakin meningkat, setelah diberikan pelatihan oleh pihak PT Pelindo III. Banyak wisatawan yang tertarik untuk berkunjung, melakukan swafoto, belajar mengenai tanaman TOGA, dan mengunjungi gerai UMKM Masyarakat disana. Perubahan sangat terlihat di Kampung Lawas Maspati, sehingga sering memperoleh bergabagai penghargaan sebagai kampung wisata.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Afriyanto, Wijayanti & Rahardian (2019) yang dilakukan di Kampung Maspati Lama, Kota Surabaya. Peneliti menemukan bahwa untuk menunjang keberhasilan pengembangan Kampung Maspati, seluruh aktor yang terlibat dalam proses baik sebelum maupun sesudah pelaksanaannya kerap melakukan komunikasi bersama yang intensif dalam program pengembangan Kampung Maspati Lama. Kendala yang sering ditemui di lapangan adalah keengganan berbagai lapisan masyarakat untuk ditunjuk menjadi ketua yang membidangi Kelompok Sadar Wisata. (Pokdarwis) yang telah terbentuk. Komunitas-komunitas yang terlibat juga intens berkomunikasi dalam forum-forum untuk mendiskusikan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan program yang dikomunikasikan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan PT. Pelindo.

Selain itu, ada tantangan yang dihadapi oleh Kampung Lawas Maspati. Program CSR yang diberikan oleh PT Pelindo III tidak berlangsung secara terus-menerus, hanya berjalan beberapa tahun. Setelah dukungan CSR ini berakhir, Sebagian pembiayaan harus ditanggung secara mandiri, karena memang focus program yang diberikan oleh PT Pelindo III yaitu bisa menjadikan Kampung Lawas

Maspati menjadi *Community Based Tourism* (CBT) atau pariwisata berbasis Masyarakat. Selain itu juga tantangan yang dihadapi yaitu promosi wisata memerlukan inovasi yang berkelanjutan, regenerasi pengelola kampung perlu diperkuat supaya keberlanjutan tetap terjaga.

Kolaborasi ini dinilai berhasil, karena bisa mewujudkan kampung wisata dan menjadikan Masyarakat semakin berdaya, sehingga bisa memperoleh pendapatan sendiri, menciptakan perubahan social dan ekonomi. Tetapi keberlanjutannya memerlukan penguatan kelembagaan local serta komitmen berkelanjutan dari para pemangku kepentingan.

KESIMPULAN

Kampung Lawas Maspati yang berada di Kota Surabaya ini menjadi tempat wisata yang menarik banyak pengunjung, kolaborasi antara warga, Pemerintah Kota, dan PT Pelindo III berjalan dengan sangat baik. Kolaborasi PT Pelindo III dengan Kampung Lawas Maspati terbangun berjalan sangat sukses dengan membangun wisata urban yang ada. Namun, kolaborasi yang dijalankan tidak berjalan secara *sustainable.* Peneliti memberi rekomendasi untuk setiap aktor kepentingan atau pemangku kepentingan daerah setempat untuk saling berkolaborasi antara masyarakat, pemerintah, swasta, dan pokdarwis untuk membuat suatu ciri khas yang akan di tampilkan untuk menjadikan Kampung Lawas Maspati menjadi objek wisata yang mempunyai ciri khasnya tersendiri. Selain itu juga pemerintah setempat melakukan *follow up* dengan mitra yang telah bekerja sama untuk merevitalisasi. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal aspek jaringan yang terbangun sebagai limitasi dalam penelitian. Maka dari itu, penulis menyarankan agar dikemudian hari beberapa peneliti lain dapat melakukan penelitian terkait penelitian dengan pendekatan *networking governance* atau *actor networking theory* (ANT) sebagai pisau analisa yang dapat digunakan dalam penelitian yang dilakukan.

REFERENSI

Afrianto, D., Wijayanti, R., & Rahardian, R. (2020). *The Success of Surabaya City in Collaborative Governance: The Case of Development of Old Kampong Maspati*. In *2nd Annual International Conference on Business and Public Administration (AICoBPA 2019)* (pp. 102-105). Atlantis Press.

Akbar, R., Supriyono, B., & Domai, T. (2022). *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Desa Wisata Gubugklakah Kabupaten Malang. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP Brawijaya). 8 (22) 170-177. DOI: https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2022.008.02.5.

Ansell, C & Gash, A. (2008) *Collaborative Governance: Theory and Practice.* Journal Public Administration Research Theory (JPART). 18:543-571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032.

Bela, H. S., & Utama, A. S. (2022). *Model Collaborative Governance dalam Pembangunan Pariwisata Alam di Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu.* Jurnal Pemerintahan Dan Politik, 7(4). https://doi.org/10.36982/jpg.v7i4.2461

Creswell, J.W (2021). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran.* Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Donahue, J, D., & Zeckhauser, R, J. (2011). *Collaborative Governance: Private Roles For Public Goals in Turbulance Times*. United Kingdom; Princeton University Press.

Detik Jabar. 2022. *Menyusuri Kampung Pelangi Surabaya Yang keindahannya Mulai Memudar*: Retrieved in: https://www.detik.com/jabar/wisata/d-6457436/menyusuri-kampung-pelangi-Surabaya-yang-keindahannya-mulai-memudar

Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaboative governance regimes*. In *Collaborative Governance Regimes*. https://doi.org/10.1111/padm.12278

Gash, A. (2016) "Chapter 37: *Collaborative governance". In Handbook on Theories of Governance.* Cheltenham, UK:Edward Elgar Publishing. Retrieved No 14, 2023, pada link: https://doi.org/10.4337/9781782548508.00049

Gurvantry, D., Febriansah, A., & Tampubolon, J. (2022). *Analisis Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Desa Wisata (Studi pada Desa Wisata Ekang di Kabupaten Bintan).* PUBLICNESS: Journal of Public Administration studies 1.(3) 174-178. DOI: https://doi.org/10.24036/publicness.v1i3.65

Herlambang, A. R., Subarsono, A., & Herwiyanti, E. (2023). Collaborative Governance in Tourism Development (Study in Karangsalam Banyumas Tourism Village). *J. Econ. Financ. Manag. Stud*, *6*(10), 4691-4700. https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i10-03.

Kirana, C. A., & Artisa, R. A. (2020). *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu.* Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik. 6(1) DOI: https://doi.org/10.26618/kjap.v6i1.3119.

Kurniawan, I. A., Widianingsih, I., Wiradinata, S. N., & Raharja, S. J. (2022). *Collaborative Governance Dalam Pengembangan Kampung Wisata Dalam Mengatasi Persoalan Kumuh Di Kota Tangerang.* Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional. Spesial Edition 105-113.

Maharami, Kelana, E.P & Madya, F. (2024). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Gayo Lues. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik. 11 (2), 564-58. DOI: https://doi.org/10.37606/publik.v11i2.1186

Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik.* Yogyakarta: Penerbit Bildung.

Rahmawati, R., Said, M., & Sekarsari, R.W. (2024). *Peran Pemerintah Kota Malang Dalamm Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau Dengan Pendekatan Konsep Collaborative Governance.* Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik. 11 (2), 728-739. DOI: https://doi.org/10.37606/publik.v11i2.1120

Risanti, F., & Winarni, F. (2018). *Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Wukirsari Di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul.*

Sindonews. 2018. *Menikmati Indahnya Kampung Lawas Maspati Kota Surabaya*. Retrieved in: https://daerah.sindonews.com/artikel/jabar/892/menikmati-indahnya-kampung-pelangi-200-kota-Surabaya

Subatin, B., & Pramusinto, A. (2019). *Collaborative Governance in Off-site Anoa Conservation at The Anoa Breeding Center of The Manado Environment and Forestry Research and Development Institute*. Policy & Governance Review, 3(1), 43-59. DOI: https://doi.org/10.30589/pgr.v3i1.126.

Zamzani, R, Mujiburohman, D.A, Salim, M.N., & Dewi, A.R. (2022). *Kebijakan Penataan Ruang Dan Pemanfaatan Danau Tempe.* Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik. 9 (2). 179-191. DOI: https://doi.org/10.37606/publik.v9i2.294.